

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS

4.1 Aspek Pemerintahan dan Agama

4.1.1 Bidang Administrasi Umum Pemerintahan

4.1.1.1 Sub-Bidang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

A. Umum

*K*eberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di era otonomi adalah menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, bersih dan berwibawa (*Clean and good governance*), oleh karena itu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai apabila pemerintahan dapat menjalankan fungsi utamanya yaitu menyelenggarakan pelayanan masyarakat, menjamin ketentraman dan ketertiban serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

*D*engan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai panduan dalam menyempurnakan struktur organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah, sehingga diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan kelembagaan daerah secara representatif sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dalam mewujudkan pelayanan masyarakat.

*P*rioritas pembangunan Bidang Administrasi Umum Pemerintahan bertujuan untuk :

1. Mengembangkan kelembagaan daerah yang amanah ;
2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah daerah yang amanah ;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan baik di dalam maupun di luar lingkungan pemerintahan daerah ;
4. Meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum.

B. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan strategis sub-bidang sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan selama tahun 2004 – 2008 adalah :

1. Program Analisa kewenangan dan kelembagaan menuju pemerintahan yang amanah, dengan kegiatan :
 - a. Pengkajian dan penetapan kelembagaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah ;
 - b. Pelaksanaan Anjab untuk 87 unit kerja ;
 - c. Pengiriman Diklat Analis sebanyak 5 orang ;
2. Program pembinaan prosedur kerja, tata kerja dan tata kedinasan lainnya dengan kegiatan :
 - a. Pembinaan dan pelatihan tata naskah dinas : 87 unit kerja
 - b. Sosialisasi sistem dan prosedur kerja
3. Program Peningkatan Kemampuan Aparatur dengan kegiatan :
 - a. Pemberian bantuan stimulan/ uang saku bagi aparatur daerah yang mengikuti pendidikan untuk setiap tahunnya ;
 - b. Penyelenggaraan Diklat-Pim Tk.IV dan Diklat Teknis : Diklat-Pim IV 30 orang untuk setiap tahunnya ;
 - c. Pengiriman peserta Diklat-Pim Tk.III 4 orang dan Diklat-Pim II 2 orang untuk setiap tahunnya ;
 - d. Mengkoordinir pendidikan dan pelatihan DIBALE ;
 - e. Mengadakan pelatihan kepada para bendaharawan barang dan petugas inventaris 87 unit kerja.
4. Program Pembebasan Lahan, dengan kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan pasar kecamatan/Induk.
5. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pengembangan Budaya Hukum dengan kegiatan :
 - a. Perumusan dan pembahasan Raperda ;

- b. Perumusan dan pembahasan Keputusan Kepala Daerah dan Perjanjian ;
- c. Pemberian bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah dan Aparat ;
- d. Penyuluhan hukum bagi Aparat dan masyarakat ;
- e. Pembinaan pendokumentasian produk hukum ;
- f. Pengundangan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah ;
- g. Pelaksanaan Lomba Kelurahan Sadar Hukum tingkat Kecamatan dan Kota ;
- h. Digitalisasi Produk Hukum Daerah.

4.1.1.2 Sub Bidang Keuangan Daerah

A. Umum

*K*eberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Namun apabila melihat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) relatif kecil dibawah 20 persen setiap tahunnya, di satu sisi pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat masih membutuhkan pembiayaan yang besar. Oleh karena itu, prioritas pembangunan keuangan daerah lebih ditujukan pada peningkatan potensi pendapatan daerah melalui upaya penggalian dan pengoptimalan sumber-sumber penerimaan daerah.

B. Program dan Kegiatan

*P*rogram dan kegiatan strategis sub-bidang Keuangan Daerah selama Tahun 2004-2008 adalah :

1. Program intensifikasi dengan kegiatan :
 - a. Meningkatkan efisiensi pemungutan menjadi sebesar 10 % ;

- b. Meningkatkan efektivitas menjadi 90 % ;
 - c. Mengurangi jumlah tunggakan pajak dan retribusi ;
 - d. Menghitung potensi penerimaan dari sumber-sumber yang potensial ;
 - e. Meningkatkan pengendalian pendapatan daerah ;
2. Program ekstensifikasi dengan kegiatan :
 - a. Pendataan WP/WR/Potensi yang ada ;
 - b. Mencari sumber penerimaan baru.
 3. Program meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan kegiatan membantu pengembangan BUMD.

4.1.1.3 Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

A. Umum

Kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban di Kota Sukabumi tidak terlepas dari imbas krisis multi dimensi yang terjadi secara nasional. Meningkatnya jumlah pengangguran, kemiskinan, menurunnya pendapatan dan daya beli masyarakat akan memicu kepada kerawanan sosial, yang berdampak kepada gangguan stabilitas keamanan ketentraman karena banyaknya pelanggaran, pencurian serta bentuk kekerasan di masyarakat. Dari data yang ada di Kepolisian gangguan Kamtibmas dan kriminal terus meningkat dari tahun ke tahun.

Kondisi politik di Kota Sukabumi tidak terlepas dari kondisi perpolitikan nasional era reformasi. Keberadaan Orsospol, Ormas dan Organisasi kepentingan lainnya semakin meningkat yang berdampak pada meningkatnya suhu perpolitikan, digulirkan melalui isu-isu kepentingan politik juga tuntutan aspirasi masyarakat kepada pemerintah baik berupa unjuk rasa, demonstrasi terus meningkat.

Tujuan prioritas pembangunan sub bidang kesatuan bangsa dan politik adalah untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pada masyarakat Kota Sukabumi.

B. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan strategis sub bidang Kesatuan Bangsa dan Politik selama tahun 2004-2008 adalah :

1. Program Penertiban dan Penegakan Perda dalam rangka reformasi birokrasi pemerintahan yang amanah dengan kegiatan :
 - a. Pemberian teguran/ pembongkaran bangunan tanpa IMB (baru/lama) ;
 - b. Penutupan tempat prostitusi/razia WTS/perjudian ;
 - c. Pendataan dan penertiban para pemilik Rumah Potong Hewan (RPH) liar ;
 - d. Penindakan kepada pemilik toko, gudang/ perusahaan yang tidak memiliki izin ;
 - e. Penertiban Pedagang Miras ;
 - f. Melaksanakan penertiban trayek dengan melakukan razia angkot bekerjasama dengan Dinas Perhubungan ;
 - g. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

4.1.1.4 Sub-Bidang Penelitian, Perencanaan dan Pengawasan

A. Umum

Belum sinergisnya sistem penelitian, perencanaan dan pengawasan di Kota Sukabumi, sehingga kejelasan pelaksanaan rencana dan hasil pembangunan belum dapat terukur secara nyata dan berkesinambungan. Oleh karena itu, sistem perencanaan dan pengawasan daerah harus komprehensif, yaitu dengan membuat perencanaan pembangunan yang transparan dan mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan masyarakat, sehingga fungsi kontrol dan

proses pengawasan baik pengawasan internal maupun pengawasan yang dilakukan masyarakat akan lebih mudah. Dalam hal ini fungsi pengawasan harus lebih proaktif dimulai dari awal perencanaan hingga akhir pelaksanaan pembangunan.

Tujuan prioritas pembangunan sub-bidang penelitian, perencanaan dan pengawasan adalah :

1. Terpadunya perencanaan pembangunan ;
2. Tercapainya hasil penelitian yang mendukung keperluan perencanaan pembangunan daerah ;
3. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan ;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pengawasan.

B. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan strategis sub-bidang Penelitian, Perencanaan dan Pengawasan selama tahun 2004-2008 adalah :

1. Program peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan dalam rangka reformasi birokrasi pemerintahan yang amanah, dengan kegiatan menyusun jaring asmara melalui Musbangkel, UDKP dan Forum Interaktif Pembangunan/Rakorbang.
2. Program Penelitian Aspek Ekonomi dan Keuangan Daerah dengan kegiatan :
 - a. Melakukan perhitungan indikator makro ekonomi ;
 - b. Melaksanakan penelitian pengembangan ekonomi daerah.
3. Program Penelitian Aspek Sosial Budaya dengan kegiatan melakukan penelitian inkesra 1 kegiatan setiap tahun.
4. Program penelitian Aspek Fisik Sarana Pemerintah dan Infra Struktur Kota dengan kegiatan melaksanakan pengkajian penataan wilayah dan kawasan (8 komponen pembangunan Kota) 1 kali kegiatan setiap tahun.

5. Program Penelitian Aspek Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan :
 - a. Melaksanakan penelitian dan pengkajian sistem pelayanan pemerintahan ;
 - b. Studi kelayakan pemindahan Pusat Pemerintahan.
6. Program Pengawasan dalam Perencanaan Pembangunan dalam rangka reformasi birokrasi pemerintahan yang amanah dengan kegiatan :
 - a. Pengawasan penyusunan 54 RASK (Dinas/ Instansi) 1 kegiatan setiap tahun ;
 - b. Pengawasan/penyusunan RAPBD 1 kegiatan setiap tahun ;
 - c. Pengawasan penyusunan 54 DASK (Dinas/ Instansi) 1 kegiatan setiap tahun ;
7. Program Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan reformasi birokrasi dengan kegiatan :
 - a. Menangani kasus-kasus atas pengaduan masyarakat s/ d 100 % dari jumlah pengaduan ;
 - b. Menangani kasus-kasus khusus pengaduan dari DPRD s/ d 100 % dari jumlah pengaduan ;
 - c. Menangani kasus-kasus khusus dan Mass Media s/ d 100 % dari jumlah pengaduan.

4.1.1.5 Sub-Bidang Informasi dan Komunikasi

A. Umum

Informasi dan komunikasi mempunyai peran dan fungsi yang signifikan terhadap sosialisasi penyelenggaraan pemerintahan serta aktivitas sosial kemasyarakatan. Peran media massa di dalam menginformasikan pelaksanaan program-program Pemerintah Kota sangat dirasakan pentingnya. Selain dari pada itu media massa merupakan alat umpan balik dan alat kontrol sosial yang cukup

efektif. Komunikasi yang berjalan dengan baik akan menimbulkan persamaan persepsi, pengetahuan serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu pengembangan sistem informasi dan komunikasi pemerintah daerah harus terus ditingkatkan sesuai dengan kode etik jurnalistik. Hal ini diharapkan agar tidak memuat pemberitaan tendensius yang mengarah atau memicu kepada hal yang fitnah dan anarkis.

Prioritas pembangunan sub-bidang informasi dan komunikasi ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyampaian informasi kepada masyarakat dalam rangka reformasi birokrasi pemerintahan yang amanah.

B. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan strategis pembangunan informasi dan komunikasi selama tahun 2004 -2008 adalah :

1. Program pengembangan sistem informasi Kantor, Dinas dan Lembaga lainnya (*Electronic Governnet*) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, dengan kegiatan :
 - a. Penataan sistem informasi pembangunan ;
 - b. Penyediaan perangkat keras (jaringan) ;
 - c. Melakukan pelatihan sistem informasi .

4.1.1.6 Sub Bidang Agama

A. Umum

Pembangunan keagamaan merupakan faktor yang sangat menunjang dalam membentuk moral dan kepribadian dalam pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat, adapun beberapa permasalahan pembangunan keagamaan yaitu masih terdapat perilaku sosial

masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, disamping itu perlu diwaspadai kemungkinan munculnya konflik antar umat beragama ataupun intern umat beragama itu sendiri, namun demikian dukungan keagamaan dalam bentuk sarana ibadah secara komposisi perbandingan cukup baik.

Prioritas pembangunan sub bidang pembangunan agama dengan tujuan mewujudkan keadaan yang harmonis untuk meningkatkan kesadaran umat dalam menjalankan kehidupan beragama.

B. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan strategis pembangunan bidang agama selama tahun 2004 –2008 adalah :

1. Program meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar umat beragama dengan kegiatan :
 - a. Memfasilitasi forum koordinasi dan komunikasi antar umat beragama.
 - b. Pembinaan mental dan spiritual aparat dan masyarakat.
2. Program menetapkan pembinaan keagamaan baik aparat maupun masyarakat dengan kegiatan pembinaan dan pemberian bantuan sarana dalam kegiatan keagamaan : 370 DKM, 136 Madrasah Diniyah, 120 RA/ TPA, 66 Ponpes, 27 MI, 99 MT, 33 Mesjid jami, 99 langgar/mushola ;
3. Program meningkatkan ketaatan umat beragama dengan kegiatan :
 - a. Melaksanakan pengajian ;
 - b. PHBI = 5 kegiatan dan TPHD = 4 orang ;
 - c. Insentif/bantuan untuk para pemuka agama ;
 - d. Melaksanakan MTQ dan Pospenas.

4.2. Aspek Ekonomi

4.2.1. Bidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan

A. Umum

Permasalahan yang timbul dalam bidang pertanian, perikanan dan peternakan merupakan permasalahan yang dirasakan oleh seluruh wilayah perkotaan. Hal ini sebagai konsekuensi dari wilayah perkotaan yaitu adanya perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian, yang tentunya berdampak pada penurunan kegiatan usaha pertanian dan pekerja pertanian. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dengan tetap memperhatikan kelestarian dan peningkatan kualitas SDM pertanian untuk pengembangan wawasan pola pikir, pengetahuan dan keterampilan memang diperlukan.

Prioritas pembangunan bidang pertanian bertujuan untuk :

1. Meningkatnya penggunaan teknologi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan) ;
2. Meningkatnya penggunaan lahan.

B. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan strategis bidang pertanian, perikanan dan peternakan selama tahun 2004 - 2008 adalah :

1. Program peningkatan pengawasan mutu hasil produksi komoditas pilihan dalam rangka pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan kegiatan :
 - a. Inventarisasi informasi dan penerapan standar produksi komoditas pilihan padi, daging, sapi/ domba hortikultura dan ikan ;
 - 1) Pengadaan peralatan bidang pertanian, peternakan dan perikanan ;
 - 2) Pengadaan 1 unit alat komunikasi/informasi pasar.

- b. Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) 1 paket ; Pengendalian penyakit hewan menular 1 paket ;
 - c. Pengendalian penyakit hewan menular 1 paket.
 - d. Pengendalian penyakit ikan 1 paket.
2. Program peningkatan Produktivitas lahan pertanian dengan kegiatan pembuatan Demplot (Demonstrasi Plot) kaji terap teknologi pada : lahan sawah, dan intensifikasi ternak, lahan darat dan lahan kolam.

4.2.2 Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

A. Umum

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB relatif kecil yakni rata-rata setiap tahun pada empat tahun terakhir sebesar 3,71 persen, kegiatan di sektor ini masih terbatas dan dalam skala kecil dan menengah, hal ini dapat terlihat dari nilai LQ berada di bawah nilai satu dan Indeks Total Keunggulan Daerah berada pada angka negatif, sehingga masih perlu untuk terus mendapatkan peningkatan/ pembinaan terhadap UKM dan Koperasi, sebaliknya untuk sektor perdagangan berperan sangat besar, yaitu rata-rata setiap tahun pada empat tahun terakhir sebesar 45,47 persen. Namun permasalahan yang ada di sektor perdagangan berkaitan dengan sarana dan prasaran kegiatan perdagangan seperti masih terkonsentrasinya pusat perdagangan di wilayah Kecamatan Cikole.

Dalam pengembangan dunia usaha permasalahan yang timbul adalah belum efektifnya sistem kemitraan antara Unit Usaha Kecil, Menengah (UKM) dan Koperasi dengan pengusaha besar, BUMD serta lembaga pembiayaan, keberpihakan kepada UKM dan Koperasi masih terbatas, hal ini disebabkan belum optimalnya

kemampuan sumber daya manusia yang tersedia dalam bidang UKM dan Koperasi.

Prioritas pembangunan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi bertujuan untuk mewujudkan secara bertahap Kota Sukabumi sebagai pusat jasa perdagangan.

B. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi selama tahun 2004 – 2008 adalah :

1. Program peningkatan kemampuan para pelaku usaha dalam rangka pengembangan kesempatan kerja dan berusaha dengan kegiatan :
 - a. Pembinaan wirausaha baru, perlindungan konsumen dan tertib niaga ;
 - b. Meningkatkan peranan lembaga keuangan dalam memberikan modal usaha pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ;
 - c. Peningkatan kemampuan para pengrajin dan kelompok pengusaha kecil dan menengah di bidang manajemen produksi dan pemasaran melalui kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat ;
 - d. Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi antara para pelaku ekonomi, pengrajin, pengusaha, pemerintah dan masyarakat ;
 - e. Pengembangan produk andalan daerah ;
 - f. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan ketahanan ekonomi masyarakat dengan titik berat kepada pelayanan jasa perdagangan ;
 - g. Peningkatan kemitraan pengusaha kecil dengan menengah dan besar ;

- h. Pembinaan asosiasi dan pembentukan wadah atau lembaga para pengusaha ;
 - i. Pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan ;
 - j. Penerbitan 300 SIPTD kepada pedagang kios pasar ;
 - k. Pemberdayaan Dekranasda ;
 - l. Peningkatan Pengembangan Pengusaha Wanita Industri Kecil (P2WK).
2. Program Penataan dan Penyebaran kawasan perdagangan dengan kegiatan :
- a. Studi kelayakan relokasi pasar pelita ;
 - b. Sosialisasi relokasi pedagang pasar induk ;
 - c. Penataan kawasan pusat pergudangan/ grosir dan kawasan perdagangan komoditi sejenis pada eks lahan terminal Cikondang, lapangan Danalaga dan eks SLTPN 10 ;
 - d. Pengkajian kluster Industri Kecil dan Menengah (IKM) ;
 - e. Pembangunan pusat pelayanan informasi (Business Centre) untuk promosi dan pemasaran komoditi ;
 - f. Pembangunan pos ukur tera ulang lokasi pasar ;
 - g. Peningkatan produksi kelompok usaha kecil dan menengah yang memiliki dampak pasar yang luas ;
 - h. Pembangunan dan pemeliharaan sarana kebersihan pusat kegiatan perdagangan di pasar pelita ;
 - i. Peningkatan status satu buah lokasi pasar dan pemasangan 6 buah *exchausfan* ;
 - j. Relokasi 30 % pedagang pasar yang meninggalkan kios di dalam pasar ;
 - k. Menempatkan PKL yang menggunakan lokasi terlarang pada lokasi yang ditunjuk ;
 - l. Penataan kawasan pasar wisata Degung 25 kios baru.

3. Program perluasan dan pengembangan usaha koperasi dalam rangka pengembangan kesempatan kerja dan berusaha dengan kegiatan :
 - a. Penataan manajemen pengelolaan perkoperasian melalui penyederhanaan birokrasi, perijinan dan profesionalisme aparat dalam rangka meningkatkan skala usaha ekonomis dan meningkatkan efisiensi.
 - b. Pemberdayaan koperasi menjadi salah satu pelaku ekonomi dan memperlancar arus distribusi barang dan jasa dalam pengembangan usaha kelompok maupun antar usaha besar melalui kemitraan.
 - c. Meningkatkan sumber daya manusia aparat melalui pelatihan motivator koperasi dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif anggota sebagai kunci keberhasilan koperasi.
4. Program peningkatan penyebaran informasi pasar dengan kegiatan:
 - a. Monitoring pengembangan harga kebutuhan pokok dan barang strategis (perkomoditi) ;
 - b. Penyebaran informasi harga melalui ; Radio 104 x per tahun, TV, Leaflet per tahun, Leaflet ;
 - c. Penyusunan prognosa kebutuhan barang pokok/ strategis 4 x per tahun.

4.2.3. Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata

A. Umum

Permasalahan kurang berkembangnya Penanaman Modal dan Pariwisata di Kota Sukabumi berkaitan dengan keterbatasan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, juga

didukung rendahnya kualitas infrastruktur kota seperti prasarana jalan dan terbatasnya jaringan jalan yang ada di Kota Sukabumi.

Prioritas pembangunan bidang penanaman modal dan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan investasi di Kota Sukabumi dengan melibatkan seluruh *stakeholder* untuk berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

B. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan strategis pembangunan penanaman modal dan pariwisata selama tahun 2004 - 2008 adalah :

1. Program peningkatan kemampuan SDM dan promosi investasi untuk menjaring investor dalam rangka pengembangan kesempatan kerja dan berusaha, dengan kegiatan :
 - a. Diklat bagi 2 orang pengelola investasi setiap tahunnya ;
 - b. Penyelenggaraan RKPPMD Tingkat Kota ;
 - c. Pembuatan buku profil investasi ;
 - d. Menyelenggarakan dan mengikuti seminar/ workshop/ lokakarya peningkatan investasi daerah ;
 - e. Pembuatan website investasi.
2. Program penataan, penertiban dan penciptaan tujuan-tujuan wisata, dengan kegiatan :
 - a. Penataan dan penertiban lokasi-lokasi wisata ;
 - b. Penciptaan lokasi-lokasi wisata baru.
3. Program pembinaan SDM pariwisata, dengan kegiatan :
 - a. Pelatihan 100 orang pengelola usaha pariwisata ;
 - b. Mengirim 20 peserta untuk mengikuti pelatihan Tk. Pusat, Propinsi dan Bakorwil ;
 - c. Pembinaan 2 kelompok penggerak pariwisata.

4.3 Aspek Sosial Budaya

4.3.1 Bidang Sosial dan Tenaga Kerja

A. Umum

*P*ermasalahan yang cukup menonjol dalam bidang sosial dan tenaga kerja yaitu masih cukup besarnya jumlah penduduk miskin dari hasil pendataan keluarga miskin Tahun 2002 dapat diketahui jumlah penduduk miskin berdasarkan karakteristik pendidikan, keterampilan, kesempatan/ peluang usaha, tidak mempunyai modal/sarana, dan miskin karena kemalasan adalah sebanyak 8.428 KK atau sebanyak 32.066 jiwa, meskipun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 958 KK atau 11,4 persen.

*D*ampak dari kenaikan jumlah penduduk yaitu bidang ketenagakerjaan, karena merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial, adapun jumlah angkatan kerja di Kota Sukabumi hasil sensus penduduk Tahun 2000 yaitu sebanyak 98.594 orang terdiri dari angkatan kerja laki-laki sebanyak 70.468 orang dan perempuan sebanyak 28.126 orang, dari jumlah angkatan kerja tersebut jumlah angkatan kerja yang mencari kerja (penganggur) sebanyak 9.477 orang atau sekitar 9,7 persen terdiri dari pencari kerja laki-laki sebanyak 6.249 orang dan pencari kerja perempuan sebanyak 3.228 orang, dan disisi lain masih ada tenaga kerja yang menerima upah di bawah UMR, serta masih adanya tenaga kerja yang mendapat perlakuan kurang menguntungkan dari majikan, selain daripada itu sebagaimana diketahui bahwa kemampuan pemerintah maupun sektor swasta dewasa ini belum sepenuhnya mampu untuk menyerap tenaga kerja, dan hampir di setiap daerah permasalahan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan selalu muncul dan menjadi isu yang utama.

Prioritas pembangunan bidang sosial dan tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan pembinaan dan informasi ketenagakerjaan.

B. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan strategis sosial dan tenaga kerja selama tahun 2004 – 2008 adalah sebagai berikut :

1. Program pengembangan kesempatan kerja berusaha dengan kegiatan :
 - a. Menginformasikan peluang kerja dan berusaha bagi para angkatan kerja ;
 - b. Menjalin kemitraan dengan para pengusaha dan industri swasta untuk dapat menyerap angkatan kerja ;
 - c. Menerapkan pemberian UKM yang memadai bagi para pekerja ;
 - d. Menjaring dan melatih serta mendidik angkatan kerja melalui BLK/LLK yang ada.

4.3.2. Bidang Kesehatan

A. Umum

Permasalahan dalam bidang kesehatan diperlihatkan dengan indikasi tinggi rendahnya derajat kesehatan di suatu daerah, dan hal ini dapat dicerminkan dengan tingkat Angka Kematian Bayi (AKB) pada Tahun 2001 sebesar 40,78 meskipun terjadi penurunan dari Tahun 2000 yaitu sebesar 41,00 selain dari masih adanya tingkat kematian bayi juga masih dijumpai kasus gizi buruk dan kasus gizi kurang.

Prioritas pembangunan bidang kesehatan bertujuan untuk mewujudkan pusat pelayanan jasa bidang kesehatan secara bertahap.

B. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan strategis pembangunan bidang kesehatan selama tahun 2004 - 2008 adalah sebagai berikut :

1. Program Pembuatan model kampung sehat sebagai upaya penanganan permukiman kumuh dengan kegiatan penunjukkan kelurahan untuk dijadikan model kampung sehat dan program lintas sektor secara terpadu.
2. Program pengkajian pembangunan dan rehabilitasi prasarana kesehatan untuk puskesmas pembantu, rumah dinas dokter, puskesmas, puskesmas plus (rawat inap) dan posyandu.
3. Program penyediaan sarana kesehatan dengan kegiatan ;
 - a. Pengadaan tenaga medis (dokter), alat medis dan perbekalan medis ;
 - b. Pengadaan mebeulair ;
 - c. pengadaan alat labkes.
4. Program penurunan AKB dengan kegiatan :
 - a. Pemeriksaan bumil dengan tenaga medis secara berkala ;
 - b. Preidsposisi bayi resiko tinggi ;
 - c. Penanganan persalinan dengan tenaga medis ;
 - d. Penanganan bayi baru lahir dengan baik ;
 - e. Penyediaan sarana NICU di RSUD ;
 - f. Penyediaan fasilitas persalinan pada semua Puskesmas.

4.3.3. Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Olah Raga

A. Umum

Jumlah penduduk miskin sebagai salah satu masalah kesejahteraan sosial merupakan faktor yang dapat menghambat keberhasilan pendidikan, ditunjukkan dengan masih adanya angka putus sekolah, pada Tahun 2002 untuk tingkat SD/ MI yaitu sebesar 0,06 persen dari jumlah siswa sebanyak 32.255 orang, tingkat SLTP

dan MTs., terancam DO sebesar 10,10 persen dari jumlah seluruh siswa sebanyak 13.873 orang, sedangkan pada tingkat SMU, SMK dan MA terancam DO sebesar 1,97 persen dari jumlah siswa seluruhnya sebanyak 18.627 orang, masalah lain dalam pembangunan pendidikan yaitu masih rendahnya angka melanjutkan khususnya dari MTs ke MA masih relatif rendah yaitu 13,52 persen dibandingkan dengan angka melanjutkan dari SLTP ke SMU dan SMK masing-masing 58,16 persen dan 67,16 persen, hal ini mengakibatkan kepada terhambatnya program penuntasan wajib belajar 9 tahun, namun untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk setiap jenjang pendidikan sudah baik khususnya untuk APK Sekolah Dasar pada Tahun 2002 sudah mencapai 118,03 persen, kemudian APK tingkat SLTP mencapai 98,70 persen dan APK tingkat SLTA sudah mencapai 111,28 persen.

*U*ntuk perguruan tinggi yang ada di Kota Sukabumi keseluruhannya milik swasta, dan sampai dengan awal Tahun 2003 tercatat ada 12 buah, dengan permasalahan yaitu masih rendahnya kualitas pelayanan pendidikan dan belum adanya Perguruan Tinggi Negeri.

*P*ermasalahan pembangunan kebudayaan dan olahraga berkaitan dengan masih rentannya ketahanan budaya, rendahnya pemberdayaan kebudayaan dan kesenian daerah serta masih rendahnya prestasi olahraga baik ditingkat Jawa Barat maupun nasional dan belum membudayanya olahraga di masyarakat, dilain pihak, perhatian pemerintah terhadap peningkatan prestasi olahraga belum optimal.

*P*rioritas pembangunan bidang pendidikan, kebudayaan dan olahraga bertujuan untuk mewujudkan pusat pelayanan jasa pendidikan secara bertahap.

B. Program dan Kegiatan

Program dana kegiatan strategis bidang pendidikan, kebudayaan dan olahraga selama tahun 2004 - 2008 adalah :

1. Program penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dan Pemberian bantuan serta subsidi silang bagi anak yang tidak mampu sebagai upaya peningkatan kebutuhan dasar masyarakat dengan kegiatan :
 - a. Pendirian SLTP Terbuka (mengatasi siswa DO) ;
 - b. Pemberdayaan SLTP swasta ;
 - c. Pemberian Beasiswa
 - (1) SD/MI = 2.228 (terancam DO)
 - (2) SLTP/MTs = 554 (terancam DO)
 - (3) SMU/MA = 184 (terancam DO)
 - d. Pemberdayaan Gerakan Teman Asuh (GTA).
2. Program kajian rehabilitasi, revitalisasi dan pembangunan gedung sekolah dengan kegiatan pengkajian SD/ MI, SLTP/ MTs dan SMU/MA yang akan direhabilitasi, revitalisasi dan pembangunan.
3. Program pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah dengan kegiatan :
 - a. Pembinaan terhadap kelompok - kelompok budaya dan kesenian daerah ;
 - b. Pengembangan bahasa daerah melalui muatan lokal (mulok) di sekolah ;
 - c. Pelestarian tempat-tempat/ bangunan bernilai sejarah (heritage).
4. Program peningkatan prestasi olah raga dengan kegiatan :
 - a. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga ;
 - b. Pembinaan dan penghargaan bagi atlet berprestasi ;
 - c. Peningkatan kompetisi pada cabang olah raga yang potensial.

4.3.4. Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat

A. Umum

*P*ermasalahan kependudukan terlihat adanya kenaikan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang tajam pada Tahun 1990 - 2000 sebesar 7,73 persen, disebabkan adanya perluasan wilayah Kota Sukabumi sehingga berdampak pula terhadap tingkat kepadatan penduduk, dan LPP Kota Sukabumi pada Tahun 2001 sebesar 1,85 persen yang berarti kembali pada angka posisi normal. Permasalahan lainnya masih kurangnya pemahaman masyarakat dan kualitas pelayanan dalam tertib administratif kependudukan.

*P*ermasalahan pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan perempuan, yaitu masih terbatasnya peran perempuan (kesetaraan gender) dalam berbagai bidang pembangunan, sehingga sangat kontradiktif bila dilihat dari jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki, hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya yaitu tingkat pendidikan SDM perempuan masih relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat pendidikan SDM laki-laki, sehingga diperlukan adanya upaya peningkatan peran perempuan diberbagai bidang pembangunan.

*P*rioritas pembangunan bidang kependudukan dan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

B. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan strategis bidang kependudukan dan pemberdayaan masyarakat selama tahun 2004 - 2008 adalah :

1. Program peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka reformasi birokrasi pemerintahan yang amanah, dengan kegiatan :

- a. Melakukan pengkajian serta perumusan, proyeksi dan perkiraan kependudukan ;
 - b. Penyelenggaraan advokasi dan sosialisasi kebijakan kependudukan ;
 - c. Melakukan pengkajian, perumusan kebijakan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan melalui pendaftaran penduduk ;
 - d. Dibukanya loket pelayanan (Akte Kelahiran, Kematian dan pernikahan) di setiap Kecamatan dan kelurahan ;
 - e. Dibukanya loket pelayanan (Akte Kelahiran, Kematian dan Pernikahan dengan persyaratan melalui imunisasi) di setiap Puskesmas dan Rumah Sakit ;
2. Program peningkatan jalinan kerjasama seluruh *stakeholders* dalam rangka menunjang 10 (sepuluh) prioritas pembangunan, dengan kegiatan :
- a. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat dan perempuan ;
 - b. Sosialisasi kepada pengusaha, swasta dengan *stakeholder* tentang jalinan kemitraan ;
 - c. Mengadakan sarasehan/workshop/seminar/lokakarya.

4.4. Aspek Tata Ruang dan Infrastruktur Kota

4.4.1. Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan, Pengairan dan Lingkungan Hidup

A. Umum

Pembangunan kota perlu dilakukan karena pembangunan kota sebagai hasil dari perencanaan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan, semakin besar proporsi pembangunan kota yang dilaksanakan semakin besar pula kemungkinan penyimpangan yang akan terjadi.

Hal ini karena kebutuhan masyarakat sangat dinamis atau selalu berubah sehingga muncul kebutuhan-kebutuhan baru yang tidak terakomodasi dalam pembangunan yang ada. Kondisi ini bila tidak segera diantisipasi secara cepat akan mempengaruhi proses pengendalian tata ruang kota yang semakin berkembang dan kurang terkendali.

*D*engan adanya pemekaran kecamatan, maka penyediaan infrastruktur kota semakin bertambah, namun kemampuan pemerintah terbatas sehingga penyediaan infrastruktur belum mampu menjangkau seluruh wilayah perluasan tersebut.

*P*ermasalahan yang dirasakan dalam lingkungan hidup berkaitan dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, misalnya ditunjukkan dengan menumpuknya sampah diberbagai saluran, demikian pula tersumbatnya beberapa saluran drainase perkotaan yang pada hakekatnya masyarakat harus turut aktif terlibat.

*P*ermasalahan lainnya dalam bidang tersebut di atas adalah belum tersosialisasikannya Peraturan Daerah tentang Tata Ruang, Tata Bangunan, Pengairan dan Lingkungan Hidup.

*P*rioritas pembangunan bidang penataan ruang, tata bangunan, pengairan dan lingkungan hidup dengan tujuan :

1. Menyediakan pedoman tata ruang kota yang berwawasan lingkungan dan berjenjang ;
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mencapai standar pelayanan minimal ;
3. Penataan lingkungan kumuh ;
4. Perbaikan sanitasi lingkungan ;
5. Pemerataan penyebaran kawasan padat penduduk ;
6. Meningkatkan pelayanan air bersih ;

7. Penanggulangan air limbah ;
8. Meningkatkan kualitas fungsi lingkungan hidup;
9. Meningkatkan sistem Septik Tank Komunal.

B. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan strategis bidang Tata Ruang, tata bangunan, Pengairan dan Lingkungan Hdup selama tahun 2003 - 2008 adalah :

1. Program Rencana Tata Ruang Detail Kecamatan (RDTR), dengan kegiatan penyusunan dan pembuatan RDTR wilayah di 5 (lima) kecamatan .
2. Program penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan tertentu, dengan kegiatan penyusunan dan pembuatan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
3. Program pembangunan sarana dan prasarana perdagangan dengan kegiatan :
 - a. Pembangunan Pasar di Kecamatan Gunung Puyuh, Warudoyong dan Baros :
 - (1). Pengadaan tanah,
 - (2). Fisik ;
 - b. Pembangunan pasar induk ;
4. Program rehabilitasi, revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, dengan kegiatan :
 - a. Rehabilitasi SD/MI (335 rusak ringan) ;
 - b. Rehabilitasi SLTP/MTs (37 rusak berat) ;
 - c. Rehabilitasi SMU/MA (6 rusak) ;
 - d. Revitalisasi SD/MI (344 rusak ringan) ;
 - e. Revitalisasi SLTP/MTs (104 rusak ringan) ;
 - f. Revitalisasi SMU/MA (13 rusak ringan) ;
 - g. Pembangunan SLTP 16;

- h. Pembangunan SMKN Terpadu ;
 - i. Penambahan lokal SMUN 5 dan pembangunan SMUN 6,7 dan 8 ;
 - j. Pembangunan SD *Regrouping* di Kecamatan Cibeureum, Lembursitu dan Situ Mekar.
5. Program rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, dengan kegiatan :
- a. Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit dan puskesmas ;
 - b. Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah ;
 - c. Rehabilitasi Puskesmas dan Pustu ;
 - d. Penyempurnaan Ruang Unit Gawat Darurat RSUD ;
 - e. Rehabilitasi 12 buah rumah dokter di Puskesmas ;
 - f. Relokasi Puskesmas.
6. Program pembangunan sarana dan prasarana umum, dengan kegiatan :
- a. Pembangunan Terminal type A (Pengkajian pembangunan terminal, Fisik bangunan dan Penyempurnaan) ;
 - b. Pembangunan sub terminal ;
 - c. Pembangunan gedung serbaguna di setiap kecamatan.
7. Program Peningkatan dan pembangunan jalan lingkungan, dengan kegiatan pembangunan jalan lingkungan di 7 (tujuh) kelurahan.
8. Program Peningkatan dan Pembangunan Jalan Gang / setapak, dengan kegiatan dan Pembangunan Jalan setapak di sembilan belas kelurahan.
9. Program Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase / air, dengan kegiatan Pembangunan Saluran Drainase di delapan Kelurahan dan pembangunan talud di sembilan Kelurahan.

10. Program sosialisasi dan penyuluhan tentang rumah sehat dan lingkungan sehat, dengan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang rumah sehat perkotaan dan lingkungan sehat.
11. Program Pembangunan Sarana MCK, dengan kegiatan Pembangunan Sarana MCK di sepuluh kelurahan.
12. Program pembangunan sistem *septic tank* komunal (percontohan), dengan kegiatan pembuatan *septic tank* di enam Kelurahan.
13. Program Perbaikan Rumah Sehat Perkotaan, dengan kegiatan Perbaikan Rumah Sehat Perkotaan
14. Program peningkatan jaringan dan pemeliharaan jaringan air bersih dengan kegiatan pembuatan instalasi pengolahan air minum dengan sumber air dari sungai Cimandiri, Cipelang dan Cisuda.
15. Program penyediaan instalasi air limbah dengan kegiatan pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan instalasi saluran air limbah.
16. Program pengawasan, pencegahan, pengendalian dan penanggulangan terhadap pencemaran dan pengrusakan lingkungan dengan kegiatan :
 - a. Pengkajian rancangan 3 (tiga) Perda tentang pengelolaan lingkungan hidup ;
 - b. Inventarisasi usaha dan kegiatan yang telah dan belum menyusun Amdal, UKL/UPL bagi 71 Perusahaan ;
 - c. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Amdal, UKL/UPL +/- 100 Perusahaan ;
 - d. Pengendalian limbah pada kawasan usaha tahu dan tempe di 2 (dua) Kelurahan.
 - e. Pengujian kualitas air sungai, udara dan limbah usaha.

17. Program peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan kegiatan :
 - a. Program kali bersih (Prokasih) ;
 - b. Program langit biru di 2 (dua) Kecamatan (Cikole dan Warudoyong) ;
 - c. Program penghijauan di setiap Kelurahan dan Kecamatan.
18. Program pengembangan data dan informasi lingkungan hidup dengan kegiatan :
 - a. Pembuatan peta sebaran dampak data dasar umum pengendalian dampak lingkungan ;
 - b. Sistem Informasi Lingkungan (SIL)
19. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan, pertanaman dan PJU dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan, pertanaman dan PJU ;
 - b. Penataan kebersihan, pertanaman, pemakaman dan PJU.

4.4.2. Bidang Perhubungan dan Kebinamargaan

A. Umum

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan panjang dan ruas jalan serta kapasitas jalan akan meningkatkan kepadatan lalu lintas yang akhirnya menimbulkan kemacetan. Keadaan lalu lintas semakin parah dengan kondisi angkutan umum yang tidak tertib, menyebabkan kemacetan pada simpul – simpul tertentu. Dilengkapi oleh kebijakan ruang yang berpusat pada satu kawasan tertentu (pusat kota) berdampak terhadap bangkitan perjalanan menuju satu titik sehingga menimbulkan sistem pergerakan orang yang berorientasi ke pusat kota.

Prioritas pembangunan bidang perhubungan dan kebinamargaan bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan efisien.

B. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan bidang perhubungan dan kebinamargaan selama tahun 2004 - 2008 adalah :

1. Program peningkatan pemeliharaan periodik dan pemeliharaan rutin jalan, dengan kegiatan :
 - a. Peningkatan jalan sebanyak 71 ruas sepanjang 96 KM ;
 - b. Pemeliharaan Periodik Jalan sebanyak 62 ruas sepanjang 108 KM ;
 - c. Pemeliharaan Rutin Jalan sebanyak 148 ruas sepanjang 155 KM ;
 - d. Pemeliharaan Drainase Jalan sebanyak 95 ruas sepanjang 32,1 KM ;
 - e. Pengecatan Beton Band sebanyak 95 ruas sepanjang 101 KM.
2. Program Membuka Daerah terisolir dan meningkatkan prasarana jalan daerah pinggiran dalam merealisasikan penyebaran pelayanan kegiatan perkotaan dengan kegiatan :
 - a. Perintisan Jalan sebanyak 16 ruas sepanjang 24 KM.
 - b. Penambahan, penataan dan penertiban trayek
3. Program Pengadaan, Pemasangan, pembuatan dan pemeliharaan fasilitas penunjang prasarana lalu-lintas, dengan kegiatan :
 - a. Penunjang Prasarana lalu-lintas meliputi ;
 - 1) Pembangunan pedestrian di wilayah perluasan ;
 - 2) Pemasangan RPPJ 100 buah ;
 - 3) Pemasangan rambu biasa 1771 buah ;
 - 4) Pemasangan rambu papan nama jalan 54 buah ;

- 5) Pengecatan marka jalan 144.020 M ;
- 6) Pemasangan *Warning Light* 8 Lokasi ;
- 7) Pemasangan Paku Marka 250 buah ;
- 8) Pengadaan rompi keselamatan 200 buah ;
- 9) Pemeliharaan *Traffic Light* 7
- 10) Pemeliharaan *Warning Light* 34 Lokasi ;
- 11) Pemeliharaan rambu.

4.4.3. Bidang Pertanahan

A. Umum

Permasalahan yang ada di bidang pertanahan yaitu sertifikasi tanah, hal ini dikarenakan kesadaran hukum masyarakat umumnya masih rendah.

Prioritas pembangunan bidang pertanahan bertujuan untuk meningkatkan penerbitan produk pertanahan (sertifikat) melalui peningkatan kinerja.

B. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan bidang pertanahan selama tahun 2004 - 2008 adalah :

1. Program peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pertanahan dan administrasi pertanahan dalam rangka reformasi birokrasi pemerintahan yang amanah, dengan kegiatan :
 - a. Pemberian pelayanan sertifikat tepat waktu ;
 - b. Pemberian sertifikat melalui Proyek Nasional Agraria (Prona), proyek APBD dan pengsertifikatan masal sporadis bekerjasama dengan pihak ke tiga ;

- c. Memberikan penyuluhan hukum pertanahan pada masyarakat ;
- d. Penyederhanaan birokrasi pelayanan sertifikat kepada pemohon yang memenuhi persyaratan ;
- e. Penyiapan peta dasar pendaftaran tanah.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.